



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

K E P U T U S A N
KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Nomor : SK. 211/Dik/PEPE/Dik-2/9/2020

T E N T A N G

KURIKULUM PELATIHAN
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA PUSAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pendidikan dan/atau pelatihan Pembentukan Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup, perlu pedoman pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang Pengawasan Lingkungan Hidup;

b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.55/MenLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup maka Peraturan Kepala pusat Diklat SDM LHK Nomor P. 6/Dik-2/2015 tanggal 31 Juli 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar-Dasar Pengawasan Lingkungan Hidup dipandang sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Kurikulum Pelatihan Pembentukan Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

4. Peraturan Menteri.....

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.55/MenLHK/SETJEN/KUM.1/11/2017 tentang Standar dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
6. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM No. P11/P2SDM/SET/DIK.2/2017, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pelatihan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
7. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM No. P.3/P2SDM/SET/OTL-0/4/2020 tentang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Metode Jarak Jauh Secara Elektronik

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT DIKLAT SDM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG KURIKULUM PELATIHAN PEMBENTUKAN PEJABAT PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP
- KESATU : Kurikulum Pelatihan Pembentukan Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Kurikulum sebagaimana diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam penyampaian materi Pelatihan Pembentukan Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup;
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Peraturan Kepala Pusat Diklat Kehutanan Nomor SK.172/Dik/PEPE/Dik-2/6/2019 tanggal 14 Juni 2019 tentang Pelatihan Pembentukan Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 22 September 2020

Di: KEPALA PUSAT,



MARIANA LUBIS
NIP. 19621112 199101 2 001

Lampiran Keputusan Kepala Pusat Diklat SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor : SK. 211 /Dik/PEPE/Dik-2/9/2020
Tanggal : 22 September 2020

1. Nama Pelatihan: Pembentukan Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup

2. Jenjang Pelatihan : Dasar

3. Latar Belakang

Pembangunan di sektor Industri, perhotelan, rumah sakit dan sektor lainnya akhir-akhir ini berkembang sangat pesat. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) dan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah usaha di Indonesia 58.97 juta unit pada 2018, yang terdiri atas usaha mikro berjumlah 58,91 juta unit (99,89%), usaha kecil 59.260 unit (0,10%), dan usaha besar 4.987 unit (0,008%). Pada tahun 2018 sebanyak 1.906 perusahaan telah mengikuti program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) periode 2017 – 2018. Berdasarkan evaluasi Tim Teknis dan pertimbangan Dewan Pertimbangan PROPER, selain peringkat EMAS dan HIJAU ditetapkan peraih peringkat BIRU 1.454 perusahaan, MERAH 241 perusahaan, dan HITAM 2 perusahaan, serta 16 perusahaan dikenakan penegakan hukum dan 18 tidak beroperasi. Dari 1.906 perusahaan tersebut terdiri dari 905 Agroindustri, 560 Manufaktur Prasarana Jasa, dan 441 Pertambangan Energi Migas. Pertumbuhan industri dan peningkatan ketaatan lingkungan hidup memberikan dampak positif antara lain berupa kenaikan devisa negara, transfer teknologi dan penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, selain memberikan dampak yang positif ternyata juga memberikan dampak negatif, yaitu berupa limbah industri yang bila tidak dikelola dengan baik dan benar akan mengganggu keseimbangan lingkungan, sehingga pembangunan yang berwawasan lingkungan tidak dapat tercapai. Karena itu perlu adanya program pengawasan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan maupun persyaratan perizinan yang berkaitan dengan masalah lingkungan.

Kegiatan pengawasan penataan lingkungan hidup merupakan salah satu upaya dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam mengelola lingkungan sebagaimana ketentuan kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan perizinan lingkungan. Hal ini sejalan dengan pasal 71-72 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa “Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan

penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan dalam melakukan pengawasan tersebut dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat/ instansi teknis”.

Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) untuk mengetahui tingkat ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pada dasarnya penataan terhadap ketentuan dalam peraturan perundang - undangan lingkungan hidup harus dilakukan dengan sukarela oleh penanggungjawab usaha/kegiatan, namun kenyataannya masih banyak yang belum taat, untuk itu perlu ada dorongan melalui program - program penataan, bahkan ada kalanya harus dilakukan upaya paksa dalam bentuk program penegakan hukum.

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat ketaatan usaha dan/atau kegiatan adalah dengan melakukan pemeriksaan (inspeksi/pengawasan) atau sering disebut juga dengan pengawasan ketaatan (compliance inspection). Pemeriksaan ini merupakan salah satu kegiatan pengawasan agar penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan mentaati semua ketentuan perundang - undangan lingkungan hidup, persyaratan dalam berbagai izin (izin usaha, izin pembuangan limbah dan lain - lain). Serta persyaratan mengenai semua media lingkungan (air, udara, tanah, kebisingan dan getaran) yang seyogyanya juga tercantum dalam perizinan yang telah dimiliki. Karena itu, kegiatan pemeriksaan yang rutin dan terprogram harus dilakukan secara terpadu dan ditindaklanjuti dengan langkah - langkah konkrit, yaitu memberikan pujian bagi yang taat dan memberikan peringatan atau sanksi bagi yang melanggar, sehingga penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dapat meningkatkan kemampuannya dalam mentaati ketentuan yang tercantum dalam peraturan maupun perizinan dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat tercapai.

Jumlah Pengawas Lingkungan Hidup (PLH) saat ini sudah cukup banyak, tetapi belum fungsional, namun karena seringnya terjadi mutasi pegawai atau pergantian pejabat, maka PLH dirasa masih sangat kurang, sehingga pendidikan dan/atau pelatihan serta pengangkatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup ini masih terus perlu dilakukan.

Sebagai seorang PLH baik di pusat maupun di daerah harus dapat menunjukkan kemampuan teknis melakukan pengawasan, berdiplomasi dan rajin serta dapat menghindari sikap ingin menguasai dantindakann

yang tercela apalagi selalu berkeinginan untuk berkolusi. Seorang PLH harus dapat mencari atau mengumpulkan informasi dan fakta lapangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau menjadi saksi dalam proses peradilan untuk menjelaskan data maupun fakta yang sebenarnya. Mengingat kewenangan PLH ini diatur dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka pada hakekatnya PLH merupakan wakil pemerintah pada saat melakukan inspeksi atau investigasi terhadap usaha dan/atau kegiatan. Sebagai wakil (agent) dari instansi pemerintah, PLH harus dapat menjaga kode etik, kejujuran dan integritas serta mental disiplin dan jaminan kualitas hasil pengawasan.

Selain itu untuk menjadi PLH yang profesional, harus mempunyai kemampuan khusus dengan mengikuti berbagai macam pelatihan di bidang lingkungan hidup, antara lain: izin lingkungan, pengelolaan B3 dan limbah B3, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengambilan sampel lingkungan, atau pelatihan teknis lainnya.

Pedoman ini memuat kurikulum dan silabus sebagai acuan dalam proses pembelajaran yang mengaitkan kegiatan pelatihan dengan pengawasan penataan lingkungan hidup yang efektif dan sistematis, serta dapat dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan pejabat fungsional pengawas lingkungan hidup.

4. Deskripsi Singkat Pelatihan

Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait ruang lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya dalam melaksanakan kegiatan pengawasan pengelolaan lingkungan. Untuk itu kurikulum ini didesain agar peserta pelatihan dapat memahami kompetensi inti yang merupakan kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh Pengawas lingkungan hidup dan kehutanan, serta kompetensi pilihan yang merupakan kemampuan pilihan keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai/diminati. Kompetensi inti meliputi kemampuan dalam melakukan pengawasan terkait dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain kompetensi tersebut di atas, sebagai fungsional juga harus memiliki pengetahuan terkait penulisan karya ilmiah dan penyusunan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK), yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan bagi seorang fungsional dalam menapaki jenjang karirnya.

Materi pelatihan terdiri dari 122 Jam Pelatihan (JP) dengan rincian mata diklat sebagai berikut; Penjelasan Program Pelatihan, Kebijakan Pengawasan Lingkungan Hidup, Etika Pengawasan Lingkungan Hidup, Dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Metodologi dan SOP Pelaksanaan Pengawasan, Pengawasan Pengendalian Pencemaran Air, Pengawasan Pengendalian Pencemaran Udara, Pengawasan Pengelolaan

Limbah B3, Pengawasan Pengelolaan Limbah Non B3 dan Sampah, Pengawasan Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3), Pengawasan Kerusakan Pencemaran Lahan/Tanah (Perkebunan, Penambangan dan Kehutanan), Pengawasan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Pengawasan Keanekaragaman Hayati, Pengawasan Izin Lingkungan, Pengawasan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Wilayah Pesisir dan Laut, Pengenalan Sistem Informasi Geografi dalam Pengawasan LHK, Karya Tulis Ilmiah, Pengambilan sampel Air Limbah, Pengambilan sampel Udara, Pengambilan sampel limbah B3, Pengambilan sampel media lahan/gambut, Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Menjadi Saksi dan Ahli, Penyusunan DUPAK Jabatan Fungsional PPLH, *Field Trip* Pengawasan Lapangan, Penyusunan Laporan Pengawasan dan Presentasi Laporan Pengawasan.

Pada mata pelatihan praktik Pengawasan dapat dilaksanakan di kelas dengan studi kasus atau di lapangan dengan kunjungan ke tempat yang representatif.

Proses pembelajaran dapat dilakukan secara *team teaching*. Proses pembelajaran menggunakan pendekatan pembelajaran andragogy.

Metode pelatihan yang digunakan pada pelatihan ini dapat secara *pure* klasikal, *pure e-learning*; atau *blended-learning*. Skema klasikal dilakukan dengan tatap muka di kelas maupun lapangan, yang terdiri dari pelajaran teori dan praktik. Skema *pure e-learning* dilakukan dengan teknik pembelajaran *synchronous* (melalui *video conference*, *live chat*) dan *asynchronous* (melalui modul/bahan ajar elektronik, forum diskusi, penugasan/*quiz*). Sedangkan skema *blended-learning* dilakukan dalam dua fase, yaitu Non Tatap Muka (NTM) dan Tatap Muka (TM). Peserta yang mengikuti fase TM adalah yang berhasil lulus pada fase NTM.

Jumlah JP untuk *synchronous* dan *asynchronous* serta TM dan NTM pada pembelajaran *Blended Learning* dan *pure E-learning* diatur dalam skenario dan jadwal pelatihan.

Di akhir pembelajaran pelatihan, akan di dilakukan evaluasi/uji bagi peserta pelatihan (metode dapat berupa *quiz* dan/atau ujian komprehensif).

5. Tujuan Pelatihan

Setelah mengikuti pelatihan ini peserta mampu melakukan pengawasan lingkungan hidup dengan baik, benar dan sistematis serta memenuhi kriteria dan persyaratan pengawasan penataan perizinan dan peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup.

6. Sasaran Pelatihan

Setelah mengikuti peserta peserta dapat:

- a. Mampu memahami kebijakan, dasar hukum dan program-program yang terkait dengan pengawasan di bidang lingkungan hidup.

- b. Mampu memahami persyaratan pengawasan serta etika profesi pengawas lingkungan hidup.
- c. Mampu memahami dan melakukan kewajiban jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup.
- d. Mampu memahami metode pelaksanaan pengawasan dan dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
- e. Mampu memahami penyusunan Karya Tulis Ilmiah dan DUPAK Jabatan Fungsional PPLH.
- f. Mampu melakukan pengawasan Izin Lingkungan
- g. Mampu melakukan pengawasan Pengendalian Pencemaran Air dan udara.
- h. Mampu melakukan pengawasan pengelolaan B3, Limbah B3, sampah dan limbah Non B3.
- i. Mampu melakukan pengawasan kerusakan tanah dan lahan serta wilayah pesisir dan laut.
- j. Mampu melakukan pengawasan keanekaragaman hayati dan Pengawasan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
- k. Mampu melakukan tindak lanjut hasil pengawasan serta menjadi saksi dan ahli.
- l. Mampu melakukan pengawasan
- m. Mampu menyusun laporan pengawasan.

7. Kelompok Sasaran Pelatihan

- a. Jumlah peserta: paling banyak 40 orang per kelas
- b. Asal peserta: Kementerian LHK, Dinas terkait lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi dan Kabupaten/Kota
- c. Persyaratan Peserta:
 - 1) Calon Fungsional PPLH yang ditetapkan dengan SK pengangkatan CPNS atau PNS yang ditugaskan sebagai PPLH dengan surat penunjukkan dari atasannya
 - 2) Belum pernah mengikuti diklat pembentukan PPLH
 - 3) Pendidikan paling rendah S1
 - 4) Golongan minimal penata muda (III/a)
 - 5) Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter
 - 6) Diutamakan telah mengikuti diklat teknis pengelolaan lingkungan atau pengalaman kerja dibidang PPLH minimal 2 tahun
 - 7) Membawa surat tugas dari instansinya.

8. Pengajar

- a. Persyaratan Pengajar :
 - Menguasai materi yang diajarkan

- Mampu melakukan pembelajaran untuk orang dewasa
- Mampu melakukan evaluasi hasil pembelajaran

b. Asal Pengajar :

- Widyaiswara Pusdiklat SDM LHK, dan/atau Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Narasumber dari Instansi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta instansi teknis lain yang terkait.
- Pakar/tenaga ahli/praktisi/akademisi yang menguasai bidangnya

9. Tempat Pelatihan

Pelatihan ini dilaksanakan di Pusat Diklat SDM LHK, Balai Diklat LHK, atau di tempat lain yang representatif.

10. Waktu Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan selama 122 JP @ 45 menit, dengan perbandingan Teori 77 JP dan Praktik 45 JP.

11. Peralatan dan Bahan Pelatihan :

- Untuk kebutuhan peserta: Alat tulis menulis, bahan ajar, *hand out*, slide presentasi, papan nama.
- Untuk ruang kelas: Papan tulis/*whiteboard*, spidol, komputer/laptop, printer, LCD, layar LCD, kertas *flipchart*, *sound system*.

12. Daftar Mata Pelatihan

NO	Mata Pelatihan	Jam Pelatihan (JP)		
		Teori	Praktik	Jumlah
1.	Penjelasan Program Pelatihan	2	-	2
2.	Kebijakan Pengawasan Lingkungan Hidup	2	-	2
3.	Etika Pengawasan Lingkungan Hidup	2	-	2
4.	Dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2	-	2
5.	Metodologi dan SOP Pelaksanaan Pengawasan	5	3	8
6.	Pengawasan Pengendalian Pencemaran Air	5	5	10
7.	Pengawasan Pengendalian Pencemaran Udara	5	5	10
8.	Pengawasan Pengelolaan Limbah B3	5	5	10
9.	Pengawasan Pengelolaan Limbah Non B3 dan Sampah	3	1	4
10.	Pengawasan Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3)	3	1	4

NO	Mata Pelatihan	Jam Pelatihan (JP)		
		Teori	Praktik	Jumlah
11.	Pengawasan Kerusakan Pencemaran Lahan/Tanah (Perkebunan, Penambangan dan Kehutanan)	3	1	4
12.	Pengawasan Pengelolaan Ekosistem Gambut	3	-	3
13.	Pengawasan Keanekaragaman Hayati	2	-	2
14.	Pengawasan Izin Lingkungan	2	-	2
15.	Pengawasan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Wilayah Pesisir dan Laut	2	-	2
16.	Pengenalan Sistem Informasi Geografi dalam Pengawasan LHK	2	3	5
17.	Karya Tulis Ilmiah	2	-	2
18.	Pengambilan sampel Air Limbah	2	-	2
19.	Pengambilan sampel Udara	2	-	2
20.	Pengambilan sampel limbah B3	2	-	2
21.	Pengambilan sampel media lahan/gambut	2	-	2
22.	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	3	1	4
23.	Menjadi Saksi dan Ahli	4	-	4
24.	Penyusunan DUPAK Jabatan Fungsional PPLH	2	4	6
25.	Penyusunan laporan	-	4	4
	Jumlah	67	33	100

13. Silabus Pelatihan Pembentukan Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup

No	Mata Pelatihan	JP			Indikator Hasil Belajar	Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan	a. Metode b. Alat bantu pembelajaran	Sumber Kepustakaan
		T	P	Jml				
1	Penjelasan Program Pelatihan	2	-	2	Setelah selesai mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat : 1. Menjelaskan program pelatihan menggunakan metode <i>e-learning</i> 2. Menjelaskan tata cara pelatihan menggunakan metode <i>e-learning</i> 3. Menjelaskan penugasan pelatihan menggunakan metode <i>e-learning</i> .	1.Program pelatihan meng-gunakan metode klasikal, <i>e-learning</i> , <i>blenden learning</i> 2.Tata Cara pelatihan meng-gunakan metode klasikal, <i>e-learning</i> , <i>blenden learning</i> 3.Penugasan pelatihan meng-gunakan metode klasikal, <i>e-learning</i> , <i>blenden learning</i>	Klasikal : a. Ceramah, tanya jawab b. LCD/Laptop, White board/ papan tulis, flipchart, spidol E-learning : a. <i>Tele conference</i> (ceramah, tanya jawab) b. LMS, Komputer/ laptop/ponsel, jaringan internet, Bahan Tayang	1. Panduan pelatihan Pusat Diklat SDM LHK
2	Kebijakan Pengawasan Lingkungan Hidup	2	-	2	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat menjelaskan : 1. Konsep Pembangunan berkelanjutan 2. Dasar Hukum dan Kebijakan Pengawasan Lingkungan Hidup. 3. Program-program Pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup. 4. Perizinan Lingkungan 5. Hubungan Pengawasan Lingkungan Hidup Sektor dan Daerah. 6. Pengembangan Kapasitas Pengawasan	1. Konsep Pembangunan berkelanjutan 2. Dasar Hukum dan Kebijakan Pengawasan Lingkungan Hidup. 3. Program-program Pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup. 4. Perizinan Lingkungan 5. Hubungan Pengawasan Lingkungan Hidup Sektor dan Daerah. 6. Pengembangan Kapasitas Pengawasan	Klasikal : a. Ceramah, tanya jawab, diskusi b. LCD/Laptop, White board/ papan tulis, flipchart, spidol E-Learning : 1. <i>Download</i> materi, <i>Tele conference</i> (ceramah, tanya jawab) 2. LMS, Komputer/ laptop/ponsel, jaringan internet, Bahan Tayang	1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3	Etika Pengawas Lingkungan Hidup	2	-	2	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat: 1. Memahami etik profesi pengawas 2. Menerapkan etika profesi pengawas dalam pelaksanaan kegiatannya 3. Menjelaskan kode etik	1. Etika Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup. 2. Sikap dan Perilaku Profesional. 3. Kode Etik.	Klasikal : a. Ceramah, tanya jawab, diskusi, b. LCD/Laptop, White board/ papan tulis, flipchart, spidol, ATK E-Learning : a. <i>Download</i> materi, <i>Tele conference</i> (ceramah, tanya jawab) b. LMS, Komputer/ laptop/ponsel, jaringan internet, Bahan Tayang	-

No	Mata Pelatihan	JP			Indikator Hasil Belajar	Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan	a. Metode b. Alat bantu pembelajaran	Sumber Kepustakaan
		T	P	Jml				
4	Dasar-dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	2	-	2	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat : 1. menjelaskan Landasan Hukum dan Kaidah 2. menjelaskan Pokok - pokok Keselamatan dan Kesehatan Kerja 3. menjelaskan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk PPLH 4. Menerapkan K3L 5. menjelaskan Peralatan standar pelindung diri (APD) 6. Menggunakan peralatan K3L	1. Landasan Hukum dan Kaidah. 2. Pokok - pokok Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 3. Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk PPLH. 4. Menerapkan K3L 5. Peralatan standar pelindung diri (APD). 6. Demo dan Peragaan Alat Pelindung Diri.	Klasikal : a. Ceramah, tanya jawab, diskusi b. LCD/Laptop, White board/ papan tulis, flipchart, spidol E-Learning : a. Download materi, Tele conference (ceramah, tanya jawab) b. LMS, Komputer/ laptop/ponsel, jaringan internet, Bahan Tayang	
5	Metodologi dan SOP Pelaksanaan Pengawasan	5	3	8	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat: 1. menjelaskant Landasan dan Kaidah Pengawasan. 2. menjelaskant Tujuan dan Lingkup Pengawasan Lingkungan Hidup. 3. menjelaskant Telaahan data dan informasi 4. menjelaskant Perencanaan Pengawasan Lingkungan Hidup. 5. menjelaskant Persiapan peralatan dan bahan. 6. menjelaskant Persiapan check list data dan informasi kegiatan pengawasan 7. menjelaskant Koordinasi Pengawasan Lingkungan. 8. Menggunakan Penaatan pelaksanaan sistem tanggap darurat. 9. Melakukkann Pemotretan dan/atau merekam audio visual. 10. Membuat Gambar sketsa. 11. Membuat Laporan pengawasan 12. Membuat Dokumentasi data dan riwayat penaatan perusahaan. 13. Membuat Konsep surat sanksi administrasi	1. Landasan dan Kaidah Pengawasan. 2. Tujuan dan Lingkup Pengawasan Lingkungan Hidup. 3. Telaahan data dan informasi 4. Perencanaan Pengawasan Lingkungan Hidup. 5. Persiapan peralatan dan bahan. 6. Persiapan check list data dan informasi kegiatan pengawasan 7. Koordinasi Pengawasan Lingkungan. 8. Penaatan pelaksanaan sistem tanggap darurat. 9. Pemotretan dan/atau merekam audio visual. 10. Gambar sketsa. 11. Laporan pengawasan 12. Dokumentasi data dan riwayat penaatan perusahaan. 13. Konsep surat sanksi administrasi	Klasikal : a. Ceramah, tanya jawab, diskusi, praktik, studi kasus b. LCD/Laptop, White board/ papan tulis, flipchart, spidol, ATK E-Learning : a. Download materi, Belajar mandiri , pemutaran video tutorial, Tele conference (ceramah, tanya jawab), live chat, studi kasus b. LMS, Komputer/ laptop/ponsel, jaringan internet, Bahan Tayang	- Permen LHK Nomor 55 Tahun 2017 tentang standar dan uji kompetensi jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup.

No	Mata Pelatihan	JP			Indikator Hasil Belajar	Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan	a. Metode b. Alat bantu pembelajaran	Sumber Kepustakaan
		T	P	Jml				
6	Pengawasan Pengendalian Pencemaran Air	5	5	10	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat: 1. menjelaskan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air 2. menjelaskan Landasan Hukum. 3. menjelaskan Tujuan pengawasan pencemaran air 4. menjelaskan Sumber-sumber pembuangan air limbah. 5. menjelaskan Sarana pengolahan air limbah, pengolahan sludge IPAL dan Sarana pemanfaatan air limbah. 6. menjelaskan Sarana pengukuran debit air limbah. Perhitungan beban pencemaran dan neraca penggunaan air limbah. 7. Mengambil contoh uji kualitas lingkungan.	1. Kebijakan Pengendalian Pencemaran Air 2. Landasan Hukum. 3. Tujuan pengawasan pencemaran air 4. Sumber-sumber pembuangan air limbah. 5. Sarana prngolahan air limbah, pengolahan sludge IPAL dan Sarana pemanfaatan air limbah. 6. Sarana pengukuran debit air limbah. Perhitungan beban pencemaran dan neraca penggunaan air limbah. 7. Mengambil contoh uji kualitas lingkungan.	Klasikal : a. Ceramah, tanya jawab, diskusi, praktik, studi kasus/praktik lapang , b. LCD/Laptop, White board/ papan tulis, flipchart, spidol, ATK E-Learning : a. Download materi, Belajar mandiri , pemutaran video tutorial, Tele conference (ceramah, tanya jawab), <i>live chat</i> , studi kasus b. LMS, Komputer/ laptop/ ponsel, jaringan internet, Bahan Tayang	-
7.	Pengawasan Pengendalian Pencemaran Udara	5	5	10	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat: 1. menjelaskan Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara 2. menjelaskan Landasan Hukum. 3. menjelaskan Sumber-sumber pencemaran udara. 4. menjelaskan Posisi lubang pengambilan sampel emisi serta sarana prasarana pengambilan sampel. 5. Menggunakan Alat pengendali pencemaran udara. 6. menjelaskan Baku mutu emisi, udara ambien, kebauan, kebisingan dan getaran. 7. menjelaskan Baku mutu emisi sumber bergerak dan kebisingan sumber bergerak. 8. menjelaskan Contoh uji kualitas udara emisi sumber bergerak dan tidak bergerak dan ambien.	1. Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara 2. Landasan Hukum. 3. Sumber-sumber pencemaran udara. 4. Posisi lubang pengambilan sampel emisi serta sarana prasarana pengambilan sampel. 5. Alat pengendali pencemaran udara. 6. Baku mutu emisi, udara ambien, kebauan, kebisingan dan getaran. 7. Baku mutu emisi sumber bergerak dan kebisingan sumber bergerak. 8. Contoh uji kualitas udara emisi sumber bergerak dan tidak bergerak dan ambien.	Klasikal : a. Ceramah, tanya jawab, diskusi, praktik, studi kasus/praktik lapang , b. LCD/Laptop, White board/ papan tulis, flipchart, spidol, ATK E-Learning : a. Download materi, Belajar mandiri , pemutaran video tutorial, Tele conference (ceramah, tanya jawab), <i>live chat</i> , studi kasus b. LMS, Komputer/ laptop/ ponsel, jaringan internet, Bahan Tayang	-

No	Mata Pelatihan	JP			Indikator Hasil Belajar	Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan	a. Metode b. Alat bantu pembelajaran	Sumber Kepustakaan
		T	P	Jml				
8	Pengawasan Pengelolaan Limbah B3	5	5	10	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat menjelaskan: 1. Kebijakan Pengelolaan Limbah B3 2. Landasan Hukum. 3. Strategi Pengawasan Pengelolaan Limbah B3. 4. Sumber-sumber Limbah B3. 5. Fasilitas penyimpanan limbah B3. 6. menjelaskan Pemanfaatan limbah B3. 7. Pengelolaan limbah B3. 8. Pengawasan kegiatan ekspor limbah B3. 9. Manifest limbah B3. 10. Tank cleaning limbah B3. 11. Pengawasan tumpahan limbah B3 di laut. 12. Perhitungan neraca limbah B3. 13. Sampel uji kualitas lingkungan.	1. Kebijakan Pengelolaan Limbah B3 2. Landasan Hukum. 3. Strategi Pengawasan Pengelolaan Limbah B3. 4. Sumber-sumber Limbah B3. 5. Fasilitas penyimpanan limbah B3. 6. Pemanfaatan limbah B3. 7. Pengelolaan limbah B3. 8. Pengawasan kegiatan ekspor limbah B3. 9. Manifest limbah B3. 10. Tank cleaning limbah B3. 11. Pengawasan tumpahan limbah B3 di laut. 12. Perhitungan neraca limbah B3. 13. Sampel uji kualitas lingkungan.	Klasikal : a. Ceramah, tanya jawab, diskusi, praktik, studi kasus/praktik lapang , b. LCD/Laptop, White board/ papan tulis, flipchart, spidol, ATK E-Learning : a. Download materi, Belajar mandiri, pemutaran video tutorial, Tele conference (ceramah, tanya jawab), <i>live chat</i> , studi kasus b. LMS, Komputer/ laptop/ ponsel, jaringan internet, Bahan Tayang	-
9	Pengawasan Pengelolaan Limbah Non B3 dan sampah	3	1	4	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat menjelaskan: 1. Kebijakan Pengelolaan limbah Non B3 dan sampah 2. Landasan Hukum. 3. Strategi Pengawasan Pengelolaan Limbah Non B3 dan sampah. 4. Kerangka Kerja Pengawasan Pengelolaan Limbah Non B3 dan sampah. 5. Sumber-sumber penghasil limbah padat non B3 dan sampah, jenis, jumlah dan pengelolaannya. 6. Sarana pemanfaatan limbah padat non B3 dan sampah. 7. Tempat pembuangan akhir (TPA) dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). 8. Contoh uji kualitas lingkungan.	1. Kebijakan Pengelolaan limbah Non B3 dan sampah 2. Landasan Hukum. 3. Strategi Pengawasan Pengelolaan Limbah Non B3 dan sampah. 4. Kerangka Kerja Pengawasan Pengelolaan Limbah Non B3 dan sampah. 5. Sumber-sumber penghasil limbah padat non B3 dan sampah, jenis, jumlah dan pengelolaannya. 6. Sarana pemanfaatan limbah padat non B3 dan sampah. 7. Tempat pembuangan akhir (TPA) dan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST). 8. Contoh uji kualitas lingkungan.	Klasikal : a. Ceramah, tanya jawab, diskusi, praktik, studi kasus/praktik lapang , b. LCD/Laptop, White board/ papan tulis, flipchart, spidol, ATK E-Learning : a. Download materi, Belajar mandiri, pemutaran video tutorial, Tele conference (ceramah, tanya jawab), <i>live chat</i> , studi kasus b. LMS, Komputer/ laptop/ ponsel, jaringan internet, Bahan Tayang	-

No	Mata Pelatihan	JP			Indikator Hasil Belajar	Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan	a. Metode b. Alat bantu pembelajaran	Sumber Kepustakaan
		T	P	Jml				
10.	Pengawasan Pengelolaan Bahan Berbahaya Beracun (B3)	3	1	4	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat menjelaskan: 1. Kebijakan Pengelolaan B3 2. Dasar Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). 3. Gudang/tempat penyimpanan B3. 4. Sarana transportasi B3. 5. Pengawasan peredaran B3. 6. Contoh uji kualitas lingkungan. 7. Studi Kasus Pengawasan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)..	1. Kebijakan Pengelolaan B3 2. Dasar Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). 3. Gudang/tempat penyimpanan B3. 4. Sarana transportasi B3. 5. Pengawasan peredaran B3. 6. Contoh uji kualitas lingkungan. 7. Studi Kasus Pengawasan Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).	Klasikal : a. Ceramah, tanya jawab, diskusi, praktik, studi kasus/praktik lapang , b. LCD/Laptop, White board/ papan tulis, flipchart, spidol, ATK E-Learning : a. Download materi, Belajar mandiri, pemutaran video tutorial, Tele conference (ceramah, tanya jawab), <i>live chat</i> , studi kasus b. LMS, Komputer/ laptop/ponsel, jaringan internet, Bahan Tayang	
11.	Pengawasan Kerusakan Pencemaran Lahan/Tanah (Perkebunan, Penambangan dan Kehutanan)	3	1	4	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat menjelaskan: 1. Kebijakan Pengendalian Kerusakan dan pencemaran lahan/Tanah, serta Landasan Hukumnya. 2. Strategi Pengawasan kerusakan dan pencemaran lahan/tanah 3. Pengawasan kerusakan dan pencemaran lahan/tanah meliputi penyiapan lahan, sarana prasarana pengendalian kerusakan lahan 4. Studi Kasus Pengawasan kerusakan dan pencemaran lahan/tanah	1. Kebijakan Pengendalian Kerusakan dan pencemaran lahan/Tanah, serta Landasan Hukumnya. 2. Strategi Pengawasan kerusakan dan pencemaran lahan/tanah 3. Pengawasan kerusakan dan pencemaran lahan/tanah meliputi penyiapan lahan, sarana prasarana pengendalian kerusakan lahan 4. Studi Kasus Pengawasan kerusakan dan pencemaran lahan/tanah	Klasikal : a. Ceramah, tanya jawab, diskusi, praktik, studi kasus/praktik lapang , b. LCD/Laptop, White board/ papan tulis, flipchart, spidol, ATK E-Learning : a. Download materi, Belajar mandiri, pemutaran video tutorial, Tele conference (ceramah, tanya jawab), <i>live chat</i> , studi kasus b. LMS, Komputer/ laptop/ponsel, jaringan internet, Bahan Tayang	
12	Pengawasan Pengelolaan Ekosistem Gambut	3	-	3	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat menjelaskan: 1. Dasar pengelolaan ekosistem Gambut 2. Tujuan pengelolaan ekosistem Gambut 3. Metode pengawasan pengelolaan	1. Dasar pengelolaan ekosistem Gambut 2. Tujuan pengelolaan ekosistem Gambut 3. Metode pengawasan pengelolaan ekosistem Gambut.	Klasikal : a. Ceramah, tanya jawab, diskusi, praktik, studi kasus/praktik lapang , b. LCD/Laptop, White board/ papan tulis, flipchart, spidol, ATK	

No	Mata Pelatihan	JP			Indikator Hasil Belajar	Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan	a. Metode b. Alat bantu pembelajaran	Sumber Kepustakaan
		T	P	Jml				
					ekosistem Gambut. 4. Kerangka Kerja Pengawasan pengelolaan ekosistem Gambut 5. Penetapan status pengawasan pengelolaan ekosistem Gambut	4. Kerangka Kerja Pengawasan pengelolaan ekosistem Gambut 5. Penetapan status pengawasan pengelolaan ekosistem Gambut	E-Learning : a. Download materi, Tele conference (ceramah, tanya jawab) b. LMS, Komputer/ laptop/ponsel, jaringan internet, Bahan Tayang	
13	Pengawasan Keanekaragaman Hayati	2	-	2	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat menjelaskan: 1. Kebijakan dan Landasan Hukum Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). 2. Kebijakan internasional terkait kehati 3. Model-model pengelolaan keanekaragaman hayati, 4. Metode pengawasan Keanekaragaman Hayati. 5. Pemeriksaan sertifikasi keanekaragaman hayati untuk produk rekayasa genetik (PRG). 6. Pengkajian resiko/analisis resiko lingkungan pada introduksi spesies asing. 7. Pengambilan Contoh uji kualitas lingkungan (keanekaragaman hayati). 8. Studi kasus pengawasan keanekaragaman hayati.	1. Kebijakan dan Landasan Hukum Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). 2. Kebijakan internasional terkait kehati 3. Model-model pengelolaan keanekaragaman hayati, 4. Metode pengawasan Keanekaragaman Hayati. 5. Pemeriksaan sertifikasi keanekaragaman hayati untuk produk rekayasa genetik (PRG). 6. Pengkajian resiko/analisis resiko lingkungan pada introduksi spesies asing. 7. Pengambilan Contoh uji kualitas lingkungan (keanekaragaman hayati). 8. Studi kasus pengawasan keanekaragaman hayati.	Klasikal : a. Ceramah, tanya jawab, diskusi, praktik, studi kasus/praktik lapang, b. LCD/Laptop, White board/ papan tulis, flipchart, spidol, ATK E-Learning : a. Download materi, Tele conference (ceramah, tanya jawab) b. LMS, Komputer/ laptop/ponsel, jaringan internet, Bahan Tayang	
14	Pengawasan Izin Lingkungan	2	-	2	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat menjelaskan: 1. Kebijakan dan peraturan tentang izin lingkungan 2. Pelaksanaan OSS 3. Tujuan pelaksanaan izin lingkungan 4. Jenis-jenis izin lingkungan 5. Metode pelaksanaan izin lingkungan.	1. Kebijakan dan peraturan tentang izin lingkungan 2. Pelaksanaan OSS 3. Tujuan pelaksanaan izin lingkungan 4. Jenis-jenis izin lingkungan 5. Metode pelaksanaan izin lingkungan. 6. Kerangka Kerja Pengawasan izin lingkungan	Klasikal : a. Ceramah, tanya jawab, diskusi, praktik, studi kasus/praktik lapang, b. LCD/Laptop, White board/ papan tulis, flipchart, spidol, ATK E-Learning : a. Download materi, Tele conference (ceramah, tanya jawab)	

No	Mata Pelatihan	JP			Indikator Hasil Belajar	Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan	a. Metode b. Alat bantu pembelajaran	Sumber Kepustakaan
		T	P	Jml				
					6. Kerangka Kerja Pengawasan izin lingkungan 7. Penetapan status pelaksanaan izin lingkungan	7. Penetapan status pelaksanaan izin lingkungan	b. LMS, Komputer/ laptop/ponsel, jaringan internet, Bahan Tayang	
15	Pengawasan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di Wilayah Pesisir dan Laut	2	-	2	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat menjelaskan: 1. Landasan Hukum. 2. Strategi Pengawasan Lingkungan di Wilayah Pesisir dan Laut. 3. Pengawasan ekosistem terumbu karang 4. Pengawasan ekosistem padang lamun. 5. Pengawasan ekosistem mangrove. 6. Pengawasan ekosistem pantai. 7. Pengawasan ekosistem kualitas air laut. 8. Pengambilan Contoh uji kualitas lingkungan di wilayah pesisir dan laut. 9. Studi Kasus Pengawasan di Wilayah Pesisir dan Laut.	1. Landasan Hukum. 2. Strategi Pengawasan Lingkungan di Wilayah Pesisir dan Laut. 3. Pengawasan ekosistem terumbu karang 4. Pengawasan ekosistem padang lamun. 5. Pengawasan ekosistem mangrove. 6. Pengawasan ekosistem pantai. 7. Pengawasan ekosistem kualitas air laut. 8. Pengambilan Contoh uji kualitas lingkungan di wilayah pesisir dan laut. 9. Studi Kasus Pengawasan di Wilayah Pesisir dan Laut.	Klasikal : a. Ceramah, tanya jawab, diskusi, praktik, studi kasus/praktik lapang, b. LCD/Laptop, White board/ papan tulis, flipchart, spidol, ATK E-Learning : a. Download materi, Tele conference (ceramah, tanya jawab) b. LMS, Komputer/ laptop/ponsel, jaringan internet, Bahan Tayang	
16	Pengenalan Sistem Informasi Geografi dalam Pengawasan LHK	2	3	5	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat menjelaskan: 1. Fungsi dan manfaat penggunaan GIS dalam pengawasan LHK 2. Pengaturan hasil/bukti dalam penggunaan GIS dalam pengawasan LHK 3. Penggunaan ponsel untuk Aplikasi GPS-GIS	1. Fungsi dan manfaat penggunaan GIS dalam pengawasan LHK 2. Pengaturan hasil/bukti dalam penggunaan GIS dalam pengawasan LHK 3. Penggunaan ponsel untuk Aplikasi GPS-GIS	Klasikal : a. Ceramah, tanya jawab, diskusi, praktik, studi kasus, b. LCD/Laptop, White board/ papan tulis, flipchart, spidol, ATK E-Learning : a. Download materi, pemutaran video tutorial, Tele conference (ceramah, tanya jawab), <i>live chat</i> , studi kasus b. LMS, Komputer/ laptop/ponsel, jaringan internet, Bahan Tayang	

No	Mata Pelatihan	JP			Indikator Hasil Belajar	Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan	a. Metode b. Alat bantu pembelajaran	Sumber Kepustakaan
		T	P	Jml				
17	Karya Tulis Ilmiah	2	-	2	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat menjelaskan: 1. Bentuk-bentuk Karya Tulis Ilmiah, seperti Buku, Jurnal dan Majalah Ilmiah 2. Teknik penulisan karya tulis ilmiah 1) Strategi penulisan KTI 2) Praktik Penulisan KTI	1. Bentuk-bentuk Karya Tulis Ilmiah - Buku - Jurnal - Majalah Ilmiah 2. Teknik penulisan karya tulis ilmiah 1) Strategi penulisan KTI 2) Praktik Penulisan KTI	Klasikal : a. Ceramah, tanya jawab, diskusi, praktik, studi kasus, b. LCD/Laptop, White board/ papan tulis, flipchart, spidol, ATK E-Learning : a. Download materi, Tele conference (ceramah, tanya jawab) b. LMS, Komputer/ laptop/ponsel, jaringan internet, Bahan Tayang	
18	Pengambilan sampel Air Limbah	2	-	2	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat menjelaskan: 1. Perencanaan pengambilan contoh air 2. Metode dan teknik pengambilan sampel air 3. Pelaksanaan pengambilan sampel air 4. Pengendalian dan jaminan mutu pengambilan sampel air	1. Perencanaan pengambilan contoh air 2. Metode dan teknik pengambilan sampel air 3. Pelaksanaan pengambilan sampel air 4. Pengendalian dan jaminan mutu pengambilan sampel air	Klasikal : a. Ceramah, tanya jawab, diskusi, praktik, studi kasus, b. LCD/Laptop, White board/ papan tulis, flipchart, spidol, ATK E-Learning : a. Download materi, Tele conference (ceramah, tanya jawab) b. LMS, Komputer/ laptop/ponsel, jaringan internet, Bahan Tayang	
19	Pengambilan sampel Udara	2	-	2	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat menjelaskan: 1. Perencanaan pengambilan contoh udara 2. Metode dan teknik pengambilan sampel udara 3. Pelaksanaan pengambilan sampel udara 4. Pengendalian dan jaminan mutu pengambilan sampel udara	1. Perencanaan pengambilan contoh udara 2. Metode dan teknik pengambilan sampel udara 3. Pelaksanaan pengambilan sampel udara 4. Pengendalian dan jaminan mutu pengambilan sampel udara	Klasikal : a. Ceramah, tanya jawab, diskusi, praktik, studi kasus, b. LCD/Laptop, White board/ papan tulis, flipchart, spidol, ATK E-Learning : a. Download materi, Tele conference (ceramah, tanya jawab) b. LMS, Komputer/ laptop/ponsel, jaringan internet, Bahan Tayang	

No	Mata Pelatihan	JP			Indikator Hasil Belajar	Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan	a. Metode b. Alat bantu pembelajaran	Sumber Kepustakaan
		T	P	Jml				
20	Pengambilan sampel limbah B3	2	-	2	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat menjelaskan: 1. Perencanaan pengambilan contoh limbah B3 2. Pengenalan peralatan pengambilan sampel limbah B3 3. Metode dan teknik pengambilan sampel limbah B3 4. Pelaksanaan pengambilan sampel limbah B3 5. Pengendalian dan jaminan mutu pengambilan sampel limbah B3	1. Perencanaan pengambilan contoh limbah B3 2. Pengenalan peralatan pengambilan sampel limbah B3 3. Metode dan teknik pengambilan sampel limbah B3 4. Pelaksanaan pengambilan sampel limbah B3 5. Pengendalian dan jaminan mutu pengambilan sampel limbah B3	Klasikal : a. Ceramah, tanya jawab, diskusi, praktik, studi kasus, b. LCD/Laptop, White board/ papan tulis, flipchart, spidol, ATK E-Learning : a. Download materi, Tele conference (ceramah, tanya jawab) b. LMS, Komputer/ laptop/ponsel, jaringan internet, Bahan Tayang	
21	Pengambilan sampel media lahan/gambut	2	-	2	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat menjelaskan: 1. Perencanaan pengambilan contoh media lahan/gambut 2. Metode dan teknik pengambilan sampel media lahan/gambut 3. Pelaksanaan pengambilan sampel media lahan/gambut	1. Perencanaan pengambilan contoh media lahan/gambut 2. Metode dan teknik pengambilan sampel media lahan/gambut 3. Pelaksanaan pengambilan sampel media lahan/gambut	Klasikal : a. Ceramah, tanya jawab, diskusi, praktik, studi kasus, b. LCD/Laptop, White board/ papan tulis, flipchart, spidol, ATK E-Learning : a. Download materi, Tele conference (ceramah, tanya jawab) b. LMS, Komputer/ laptop/ponsel, jaringan internet, Bahan Tayang	
22	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	4	2	6	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat menjelaskan: 1. Landasan Hukum Dan Kaidah pengawasan lingkungan. 2. Pengertian Dan Faktor Yang Menentukan Usulan Tindak Lanjut Pengawasan. 3. Hasil Pengawasan Dan Tindak Lanjut Pengawasan 4. Jenis Dan Mekanisme Pelaksanaan Tindak Lanjut Pengawasan 5. Pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian	1. Landasan Hukum Dan Kaidah a. Landasan Hukum b. Kaidah 2. Pengertian Dan Faktor Yang Menentukan Usulan Tindak Lanjut Pengawasan a. Pengertian b. Faktor Yang Menentukan Ketepatan Usulan Tindak Lanjut Pengawasan. 3. Hasil Pengawasan Dan Tindak Lanjut Pengawasan	Klasikal : a. Ceramah, tanya jawab, diskusi, praktik, studi kasus, b. LCD/Laptop, White board/ papan tulis, flipchart, spidol, ATK E-Learning : a. Download materi, Belajar mandiri, Tele conference (ceramah, tanya jawab), <i>live chat</i> , studi kasus b. LMS, Komputer/	

No	Mata Pelatihan	JP			Indikator Hasil Belajar	Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan	a. Metode b. Alat bantu pembelajaran	Sumber Kepustakaan
		T	P	Jml				
					sengketa lingkungan diluar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	a. Hasil Pengawasan b. Tindak Lanjut Pengawasan 4. Jenis Dan Mekanisme Pelaksanaan Tindak Lanjut Pengawasan a. Pembinaan Teknis b. Sanksi Administrasi c. Penyelesaian Sengketa Lingkungan d. Hukum Pidana 5. Pemantauan pelaksanaan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.	laptop/ponsel, jaringan internet, Bahan Tayang	
23	Menjadi Saksi dan Ahli	4	-	4	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat menjelaskan: 1. Landasan hukum menjadi saksi dan/atau ahli dalam proses penegakan hukum lingkungan. 2. Pengertian, perbedaan, persyaratan dan kewajiban saksi dan ahli 3. Tujuan menjadi saksi dan ahli, 4. Pelaksanaan menjadi saksi dan ahli.	1. Landasan hukum menjadi saksi dan/atau ahli dalam proses penegakan hukum lingkungan. 2. Pengertian, perbedaan, persyaratan dan kewajiban saksi dan ahli. 3. Tujuan dan etika menjadi saksi ahli 4. Cara mempersiapkan dan strategi memberikan kesaksian atau keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau proses persidangan	Klasikal : a. Ceramah, tanya jawab, diskusi, praktik, studi kasus, b. LCD/Laptop, White board/ papan tulis, flipchart, spidol, ATK E-Learning : a. Download materi, Belajar mandiri , Tele conference (ceramah, tanya jawab) b. LMS, Komputer/ laptop/ponsel, jaringan internet, Bahan Tayang	
24.	Penyusunan DUPAK Jabatan Fungsional PPLH	4	2	6	Setelah mengikuti mata pelatihan ini peserta dapat menjelaskan: 1. Pengertian, Rumpun Jabatan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Instansi Pembina 2. Jenjang Jabatan, Angka Kredit dan Penilaian Angka Kredit. 3. Pengangkatan dan Formasi,	1. Pengertian, Rumpun Jabatan, Kedudukan, Tugas Pokok, dan Instansi Pembina. 2. Jenjang Jabatan, Angka Kredit dan Penilaian Angka Kredit. 3. Pengangkatan dan Formasi,	Klasikal : a. Ceramah, tanya jawab, diskusi, praktik, studi kasus, b. LCD/Laptop, White board/ papan tulis, flipchart, spidol, ATK	

No	Mata Pelatihan	JP			Indikator Hasil Belajar	Pokok Bahasan/Sub Pokok Bahasan	a. Metode b. Alat bantu pembelajaran	Sumber Kepustakaan
		T	P	Jml				
					Penurunan dan Pembebasan Sementara, Pemberhentian dan Inpassing	Penurunan dan Pembebasan Sementara, Pemberhentian dan Inpassing.	E-Learning : a. Download materi, Belajar mandiri , Tele conference (ceramah, tanya jawab), <i>live chat</i> , studi kasus b. LMS, Komputer/ laptop/ponsel, jaringan internet, Bahan Tayang	
25.	Penyusunan Laporan				common capitalizations. gikuti mata pelatihan ini at: skan Dasar pelaksanaan pengawasan lapangan 2. Pengertian dan perencanaan pengawasan lapangan 3. Pelaksanaan pengawasan lapangan 4. Melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan sesuai dengan media lingkungan/izin lingkungan usaha/kegiatan 5. Melakukan presentasi laporan hasil pengawasan	1. Dasar pelaksanaan pengawasan lapangan 2. Pengertian dan perencanaan pengawasan lapangan a. Persiapan pelaksanaan pengawasan lapangan b. Penyusunan bahan dan form isian pengawasan lapangan 3. Pelaksanaan pengawasan lapangan 4. Penyusunan laporan pengawasan sesuai dengan media lingkungan/izin lingkungan usaha/kegiatan 5. Presentasi laporan hasil pengawasan	Klasikal : a. Ceramah, tanya jawab, diskusi, praktik, studi kasus, b. LCD/Laptop, White board/ papan tulis, flipchart, spidol, ATK E-Learning : a. Download materi, Tele conference (ceramah, tanya jawab) b. LMS, Komputer/ laptop/ponsel, jaringan internet, Bahan Tayang	
		67	33	100				



KEPALA PUSAT,

MARIANA LUBIS
NIP. 19621112 199101 2 001